

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Setiap individu memiliki kesetaraan hak dan kewajiban dalam ikut serta pada proses pengambilan keputusan. Di Indonesia, nilai-nilai demokrasi tersebut diwujudkan melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi, salah satunya melalui pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Melalui Pemilu, masyarakat Indonesia memiliki hak untuk secara langsung memilih para pemimpin yang akan duduk di lembaga legislatif maupun eksekutif, termasuk Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota¹. Sistem ini membuka ruang partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan negara, sekaligus menjadi tolok ukur bagi berjalannya pemerintahan yang demokratis² (Alfarisyi et al., 2023; Firmanto & Abadi, 2023).

Tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada mencerminkan kualitas dari demokrasi yang dijalankan. Keterlibatan warga tidak hanya terbatas pada saat hari pencoblosan, tetapi juga dalam keseluruhan proses politik, seperti dalam kegiatan kampanye, debat publik, pemantauan jalannya pemilu, hingga peran serta dalam menilai dan mengawasi kinerja kandidat terpilih³. Dengan demikian, Pilkada bukan

¹ Pemilu merupakan perwujudan nyata dari asas kedaulatan rakyat yang tercantum dalam UUD 1945, dimana rakyat tidak hanya menjadi objek kebijakan, tetapi juga subjek yang menentukan arah kepemimpinan negara.

² Keberlangsungan Pemilu yang jujur, adil, dan terbuka menjadi indikator penting dalam menilai kualitas demokrasi suatu negara.

³ Keterlibatan masyarakat dalam tahapan pra dan pasca pemilu memperlihatkan bahwa demokrasi tidak berhenti pada bilik suara, melainkan merupakan proses yang berkelanjutan.

semata-mata ajang kontestasi antar calon kepala daerah, melainkan juga merupakan wahana penting bagi masyarakat untuk mengekspresikan suara dan kehendaknya secara langsung dalam menentukan arah pembangunan di wilayahnya. Proses ini menunjukkan bahwa demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang mengakui dan memfasilitasi keterlibatan aktif rakyat dalam segala tahapan politik (Hafsari et al., 2024).

Namun demikian, partisipasi politik masyarakat dalam Pilkada masih menghadapi tantangan baik dari sisi struktural maupun kultural. Hambatan seperti praktik politik uang, kampanye negatif, dan rendahnya literasi politik menurunkan kualitas partisipasi pemilih di sebagian daerah. Selain itu, terdapat ketimpangan akses informasi politik antara wilayah perkotaan dan pedesaan, yang turut berdampak pada kesadaran pemilih untuk menentukan pilihan secara rasional. Kendala-kendala ini menjadi serius karena dapat menggeser proses demokrasi dari kesadaran rakyat menjadi transaksi politik semata (Perdana et al., 2024).

Sebelum diberlakukannya sistem pemilihan langsung, kepala daerah dipilih secara tidak langsung oleh DPRD melalui rapat paripurna, lalu disahkan oleh Presiden atau Menteri Dalam Negeri. Sistem ini dinilai membatasi partisipasi rakyat dan rentan terhadap praktik politik transaksional. Perubahan signifikan terjadi dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, yang menggantikan UU Nomor 22 Tahun 1999. Melalui regulasi ini, Pilkada langsung mulai diberlakukan pada tahun 2005, memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah secara langsung. Reformasi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat demokrasi, dengan harapan meningkatkan legitimasi serta akuntabilitas pemimpin

daerah. Untuk menyempurnakan pelaksanaannya, pemerintah menerbitkan UU No. 12 Tahun 2008 dan memperkuat peran KPU sebagai penyelenggara, guna menjamin proses pemilu yang transparan, sah, dan demokratis⁴ (Lestari et al., 2024; Pontoh et al., 2015; Ula, 2012).

Perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah telah mengubah struktur dan dinamika politik lokal, termasuk di Kabupaten Cianjur. Sebagai tindak lanjut dari implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten Cianjur menyelenggarakan Pilkada langsung pertamanya pada tahun 2006. Terdapat empat pasangan calon yang bersaing seperti pada tabel dibawah :

Tabel 1.1 Hasil Rekapitulasi Suara Pilkada 2006

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Jumlah Suara	Persen
1.	Wasidi Swastomo Ade Barkah Surahman	Golkar PKB PBB PAN PNBK PPNJI PBR PKPB PPDI Partai Pelopor	309.181	34,08%
2.	Dadang Rahmat Kusnadi Sundjaja	PDIP	218.391	24,07%
3.	Tjetjep Muchtar Soleh Dadang Sufianto	Demokrat PKS	311.802	34,37%
4.	Yayat Rustandi Titin Suastini	PPP	67.936	7,49%
Jumlah Suara			907.310	100%

Sumber Data Sekunder : (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur)

⁴ Disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan penyempurnaannya melalui UU Nomor 12 Tahun 2008 merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menata ulang sistem politik yang lebih demokratis.

Hasil perolehan suara menunjukkan bahwa pasangan Tjetjep Muchtar Soleh dan Dadang Sufianto, yang diusung oleh Partai Demokrat dan PKS, memperoleh suara terbanyak yaitu 311.802 suara (34,37%), disusul oleh Wasidi Swastomo – Ade Barkah Surahman yang didukung oleh koalisi luas seperti Golkar, PKB, PAN, dan beberapa partai lainnya, dengan perolehan 309.181 suara (34,08%). Pasangan dari PDIP, Dadang Rahmat – Kusnadi Sundjaja, memperoleh 218.391 suara (24,07%), sementara Yayat Rustandi – Titin Suastini yang diusung oleh PPP hanya meraih 67.936 suara (7,49%). Dengan hasil tersebut, pasangan Tjetjep–Dadang resmi menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Cianjur periode 2006–2011, sekaligus menjadi kepala daerah pertama yang dipilih langsung oleh masyarakat di Kabupaten Cianjur.

Pada Pilkada tahun 2011, Tjetjep Muchtar Soleh kembali mencalonkan diri bersama Suranto, dan memperoleh dukungan dari Demokrat, PBB, dan PAN. PDIP dalam kontestasi kali ini mengalami fragmentasi internal, dengan munculnya dua pasangan calon yang sama-sama mengklaim dukungan dari partai tersebut, yakni pasangan Dadang Sufianto – RK Dadan dan pasangan Hidayat Makbul – Sumitra⁵. Perpecahan dukungan ini berdampak pada melemahnya kekuatan elektoral PDIP.

Sementara itu, Pilkada tahun 2015 menandai pergeseran arah koalisi ketika pasangan Irvan Rivano Muchtar – Herman Suherman yang hanya didukung oleh Partai Golkar, PKB, PAN dan PBB berhasil mengungguli pasangan Suranto – Aldwin Rahadian yang justru diusung oleh koalisi besar beranggotakan tujuh partai,

⁵ Konflik internal dalam tubuh partai menjelang Pilkada kerap kali menyebabkan dualisme pencalonan, yang pada akhirnya membingungkan pemilih dan memperlemah suara partai secara keseluruhan.

termasuk PDIP, Demokrat, PKS, Gerindra, dan NasDem. Fakta ini menunjukkan bahwa besarnya koalisi tidak menjamin kemenangan tanpa adanya konsolidasi internal yang efektif dan strategi kampanye yang terarah.

Momentum perubahan koalisi mencapai puncaknya pada Pilkada tahun 2020, ketika PDIP dan Partai Golkar, dua partai besar yang pada periode sebelumnya kerap bersaing, membentuk koalisi bersama dan mengusung pasangan Herman Suherman - Tb Mulyana Syahrudin. Didukung pula oleh NasDem, PAN, dan PPP, koalisi ini berhasil meraih kemenangan dengan persentase suara tertinggi, yakni 56,97%. Sementara itu, pasangan dari koalisi PKB–PKS serta pasangan dari Gerindra–Demokrat memperoleh suara yang lebih rendah, masing-masing sebesar 31,18% dan 8,30%.

Perubahan koalisi partai politik di Pilkada Cianjur dari 2006 hingga 2020 menunjukkan kecenderungan terbentuknya koalisi-koalisi baru yang tidak selalu bersifat permanen. Setiap periode Pilkada menampilkan dinamika yang berbeda, tergantung pada strategi partai serta kekuatan calon. Koalisi yang terbentuk tidak selalu berdasarkan kesamaan ideologi, melainkan lebih pragmatis dan berorientasi pada peluang kemenangan. Hal ini tampak jelas dalam pergeseran partai-partai besar seperti PDIP, Golkar, PKB, dan Gerindra yang dalam beberapa periode saling berganti posisi sebagai lawan atau mitra koalisi. Dalam konteks ini, kontestasi Pilkada Cianjur tahun 2024 menjadi menarik untuk ditelaah karena menunjukkan pola koalisi yang lebih kompleks dan luas dibandingkan periode sebelumnya⁶.

⁶ Pilkada 2024 dipandang penting karena memperlihatkan koalisi yang lebih luas dan kompleks, sekaligus mengindikasikan semakin meningkatnya intensitas kompetisi politik di Cianjur.

Gambar 1.1 Pasangan Calon Bupati Kabupaten Cianjur 2024



Sumber Gambar: (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2024)

Pilkada Kabupaten Cianjur pada tanggal 27 November 2024, menjadi pemilihan bupati secara langsung yang kelima kalinya dan diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon bupati dan wakil bupati seperti yang terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Pasangan Calon Bupati Cianjur 2024

No	Pasangan Calon	Partai Pengusung	Perolehan Kursi DPRD Kab. Cianjur	Total
1.	Herman Suherman - Muhammad Solih Ibang, SH	PDIP PKB DEMOKRAT PAN PPP GELORA PBB PKN GARUDA	6 6 5 4 1 0 0 0 0	22 Kursi DPRD
2.	Mohammad Wahyu Ferdian - Ramzi Geys Thebe	GERINDRA NASDEM Partai Buruh PSI Partai Ummat	7 6 0 0 0	13 Kursi DPRD
3.	Deden Nasihin - Neneng Efa Fatimah	GOLKAR PKS PERINDO	10 5 0	15 Kursi DPRD

Sumber Data Sekunder: (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2024)

Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tahun 2024, terdapat tiga pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan dukungan partai politik

yang berbeda. Pasangan Herman Suherman – Muhammad Solih Ibang, SH memperoleh dukungan koalisi terbesar dengan total 22 kursi DPRD, yang berasal dari PDIP, PKB, Demokrat, PAN, PPP, serta partai-partai lain seperti Gelora, PBB, PKN, dan Garuda. Komposisi ini menjadikan Herman–Solih Ibang memiliki basis politik paling gemuk, sehingga secara formal memiliki posisi tawar yang kuat dalam kontestasi Pilkada Cianjur 2024⁷.

Basis kekuatan koalisi besar terbukti efektif pada Pilkada 2020, ketika pasangan Herman Suherman – Tb. Mulyana berhasil meraih kemenangan dengan perolehan suara sebesar 56,97%. Secara teoritis, dukungan struktural dari koalisi partai-partai besar memang memberikan keuntungan elektoral yang signifikan karena mampu menghadirkan sumber daya politik, finansial, dan jaringan dukungan yang luas (Ibrahim, 2022; Jeivelien Edenia Andries, Marlien T. Lopian, 2023).

Namun demikian, koalisi besar bukanlah faktor deterministik yang secara otomatis menjamin kemenangan, terutama apabila figur petahana mengalami penurunan legitimasi akibat faktor internal maupun eksternal, khususnya terkait persepsi publik terhadap kinerjanya. Konteks ini tercermin dalam perjalanan politik Herman Suherman. Meski pada Pilkada 2020 beliau berhasil memperoleh 600.394 suara atau 56,97%, yang menegaskan posisinya sebagai figur dominan di Kabupaten Cianjur, reputasinya kemudian perlahan mengalami kemunduran. Sebelum terjun ke dunia politik, Herman meniti karier sebagai pejabat birokrat dan

⁷ Koalisi besar memang memberi keuntungan struktural, tetapi tidak bersifat deterministik, kemenangan tetap lebih banyak ditentukan oleh popularitas kandidat, strategi kampanye, serta efektivitas mobilisasi pemilih di akar rumput.

menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Mukti periode 2011–2015, pengalaman awal yang menjadi modal penting dalam membangun citra profesionalnya. Namun, sejak menjabat sebagai Wakil Bupati pada 2016, muncul sejumlah dugaan kasus korupsi yang menyeret namanya, mulai dari kasus PDAM Tirta Mukti, dugaan korupsi APBD Cianjur 2019 senilai Rp1,2 triliun, hingga dugaan korupsi pengadaan lahan Kantor Kecamatan Cugenang. Kondisi ini diperburuk dengan munculnya isu pascagempa Cianjur 2022, ketika Acsena Humanis Respon Foundation melaporkannya ke KPK terkait dugaan penyalahgunaan bantuan kemanusiaan dari *Emirates Red Crescent*⁸. Laporan tersebut menuduh adanya penggantian kemasan bantuan yang kemudian didistribusikan tanpa label resmi, bahkan diduga sebagian dijual di pasar umum. Meskipun Herman membantah tuduhan tersebut dan menyebutnya fitnah, rangkaian kasus ini telah menimbulkan sorotan tajam publik serta mengikis legitimasi politiknya (Amalia, 2022; Aziz, 2022; Egi Ginanjar & Kosandi, 2023; Ibrahim, 2022).

Dengan demikian, pengalaman Herman Suherman memperlihatkan bahwa meskipun koalisi besar dapat menjadi instrumen penting dalam memenangkan kontestasi elektoral, keberlangsungan legitimasi seorang kepala daerah sangat ditentukan oleh integritas personal, kinerja birokratis, dan persepsi publik. Koalisi besar terbukti efektif dalam jangka pendek memenangkan Pilkada, tetapi tidak mampu sepenuhnya melindungi kandidat dari dampak negatif isu korupsi maupun penyalahgunaan kewenangan yang menciderai kepercayaan masyarakat.

⁸ *Emirates Red Crescent* (ERC) merupakan organisasi kemanusiaan yang berbasis di Uni Emirat Arab (UEA) dan berafiliasi dengan *International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies* (IFRC)

Berbeda dengan pasangan nomor urut pertama, pasangan nomor urut dua, Dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi Geys Thebe menjadi pasangan calon yang tidak memiliki karier politik. Wahyu Ferdian merupakan seorang dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sebelumnya bekerja sebagai tenaga medis di RSUD Sayang Cianjur. Sedangkan Ramzi Geys Thebe dikenal masyarakat sebagai publik figur sekaligus pembawa acara televisi. Ia menamatkan pendidikan formal terakhir di tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA)⁹ dan tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi. Popularitas yang diperolehnya dari dunia hiburan memberinya visibilitas luas di mata publik, namun Ramzi tidak memiliki rekam jejak sebagai politisi maupun kader partai. Hal ini memperlihatkan bahwa modal utama yang diandalkannya dalam pencalonan Pilkada Cianjur 2024 lebih banyak bersumber dari popularitas personal serta kedekatan dengan masyarakat, dibandingkan pengalaman politik atau basis kaderisasi partai (Ariyanto, 2024; Desi, 2025).

Meskipun demikian, secara personal, Wahyu Ferdian memiliki keterkaitan dengan dunia politik melalui jalur keluarga. Ia merupakan menantu dari Tjetjep Muchtar Soleh, yang menjabat sebagai Bupati Cianjur periode 2006–2016, sekaligus adik ipar dari Irvan Rivano Muchtar¹⁰, Bupati Cianjur periode 2016–2021¹¹. Secara elektoral pasangan calon ini didukung oleh lima partai politik,

⁹ Artikel oleh Sinta Desi Arini, “Profil Ramzi, Biodata, Karier, dan Perjalanan ke Dunia Politik,” 24 Februari 2025, diakses penulis pada 17 September 2025, <https://www.harapanrakyat.com/2025/02/profil-ramzi-biodata-karier-dan-perjalanan-ke-dunia-politik/>.

¹⁰ Irvan Rivano Muchtar merupakan bupati Cianjur periode 2016–2021, tetapi di tahun kedua ia menjabat, beliau harus berhenti dari status Bupati Cianjur atas kasus korupsi DAK Pendidikan dan digantikan oleh wakilnya Herman Suherman.

¹¹ Koneksi kekerabatan ini memberi Wahyu Ferdian keuntungan dalam hal akses terhadap jaringan kekuasaan di daerah, meskipun secara formal ia tidak memiliki karier politik.

namun dengan kombinasi yang berbeda. Mereka diusung oleh Gerindra, Nasdem, Partai Buruh, PSI, dan Partai Ummat. Dari lima partai tersebut, pasangan nomor urut dua ini mendapatkan 13 jumlah kursi, dengan rincian 7 kursi dari Gerindra dan 6 kursi dari Nasdem, sementara Partai Buruh, PSI, dan Partai Ummat tidak memiliki wakil di DPRD (Arnen, 2024; Selamat, 2024).

Di sisi lain, pasangan Deden Nasihin – Neneng Efa Fatimah diusung oleh Golkar, PKS, dan Perindo dengan total 15 kursi DPRD, menjadikan mereka salah satu poros penting dalam Pilkada Cianjur 2024. Golkar sebagai partai peraih kursi terbanyak di DPRD Kabupaten Cianjur menyumbang 10 kursi, sementara PKS menambah 5 kursi, dan Perindo memperkuat dukungan meski tanpa perolehan kursi. Koalisi ini terbilang lebih ramping dibandingkan Herman–Ibang, namun justru terlihat solid karena mengandalkan mesin partai dengan basis pemilih yang loyal dan terorganisir. Dengan demikian, peta persaingan Pilkada Cianjur 2024 memperlihatkan dominasi awal pasangan Herman–Solih dengan koalisi besar, namun dua pasangan lain Wahyu–Ramzi dan Deden–Neneng tetap menjadi kompetitor kuat yang dapat mengubah arah pertarungan politik.

Tabel 1.3 Hasil Perolehan Suara Pilkada Kab. Cianjur 2024

No	Pasangan Calon	Jumlah Suara	Persen
1.	H. Herman Suherman, ST., M.AP H. R.A Muhammad Solih Ibang, SH	417.774	39,14%
2.	Dr. Mohammad Wahyu Ferdian Ramzi	442.321	41,43%
3.	Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, M.K.P Dr. Neneng Efa Fatimah, M.H., M.Kes	207.423	19,43%
Jumlah Suara Sah		1.067.518	100.00%
Suara Sah		1.067.518	95,24%
Suara Tidak Sah		53.411	4,76%
Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih		1.120.929	61,70%
Golput		695.739	38,30%
Pemilih Terdaftar		1.816.668	100,00%

Sumber Data Sekunder : *(Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Tahun 2024)*

Berdasarkan data yang tercantum dalam Tabel 1.3 hasil rekapitulasi suara menunjukkan bahwa pasangan Wahyu-Ramzi memperoleh jumlah suara terbanyak, yaitu 442.321 suara atau 41,43% dari total 1.067.518 suara sah, sehingga dinyatakan sebagai pasangan yang unggul dalam kontestasi tersebut¹². Seperti yang disampaikan disampaikan langsung oleh Hendry Juanda :

*"Kemenangan pasangan Wahyu-Ramzi dipengaruhi beberapa faktor salah satunya oleh efek elektoral dari kemenangan Prabowo Subianto di Kabupaten Cianjur pada Pilpres 2024, mencapai sekitar 62%. Selain itu, dukungan koalisi Gerindra (7 kursi) dan NasDem (6 kursi), ditambah Partai Buruh, PSI, dan Partai Ummat, menjadi basis politik yang menopang pencalonan. Strategi kemenangan pasangan ini difokuskan pada penjualan program-program nasional Partai Gerindra, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis"*¹³

Kemenangan pasangan Wahyu-Ramzi di Pilkada Cianjur 2024 dapat dijelaskan melalui konsep efek ekor jas (coattail effect), yakni fenomena ketika kemenangan kandidat di tingkat nasional ikut mendongkrak peluang kandidat di tingkat daerah yang berada dalam satu garis partai atau koalisi. Dalam hal ini, kemenangan Prabowo Subianto secara nasional pada Pilpres 2024, yang di Kabupaten Cianjur mencapai sekitar 62% suara, memberikan pengaruh terhadap elektabilitas Wahyu-Ramzi. Keberhasilan Prabowo di panggung nasional tidak hanya mengonsolidasikan suara Partai Gerindra secara umum, tetapi juga menyalurkannya ke daerah, sehingga preferensi pemilih turut terbawa ke kontestasi di daerah.

¹² Keberhasilan Wahyu-Ramzi menunjukkan untuk pertama kalinya dalam Pilkada Kabupaten Cianjur, pasangan non-politisi berhasil unggul atas kandidat lain.

¹³ Wawancara dengan Hendry Juanda, Sekretaris DPC Partai Gerindra Kab. Cianjur, ditemui langsung oleh penulis pada tanggal 11 Agustus 2025.

Kemudian pasangan nomor urut satu, H. Herman Suherman, ST., M.AP dan H. R.A Muhammad Solih Ibang, SH, berada pada urutan kedua dengan 417.774 suara atau 39,14%. Sedangkan pasangan ketiga, Dr. Deden Nasihin, S.Sos.I, M.K.P dan Dr. Neneng Efa Fatimah, M.H., M.Kes, memperoleh 207.423 suara, yang setara dengan 19,43% dari total suara sah¹⁴.

Dalam Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, hasil perolehan suara yang menunjukkan selisih tipis antara pasangan calon nomor urut satu, Herman Suherman dan Muhammad Solih Ibang, dengan pasangan nomor urut dua, Wahyu-Ramzi, mencerminkan adanya polarisasi di kalangan pemilih. Meskipun Herman Suherman sebagai petahana dan didukung oleh sembilan partai politik serta memiliki rekam jejak kepemimpinan yang kuat, Ia harus menerima kekalahan dari pendatang baru yang menawarkan visi perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa strategi kampanye, isu yang diangkat, serta kekuatan mesin partai politik memainkan peran krusial dalam menentukan hasil akhir.

Keberhasilan dalam pemilu tidak hanya ditentukan oleh figur calon, melainkan juga oleh kemampuan partai politik dalam melakukan mobilisasi suara dan konsolidasi struktur partai hingga ke tingkat akar rumput. Namun, dalam beberapa kasus, kekuatan partai politik tidak selalu menjadi penentu utama kemenangan. Hal ini menunjukkan bahwa faktor personalitas dan strategi kampanye yang tepat dapat mengimbangi bahkan mengungguli kekuatan partai

¹⁴ Selisih antara pasangan pertama dan kedua sebesar 2,29% menunjukkan kompetisi yang ketat dan potensi fluktuasi pilihan pemilih yang tinggi pada detik-detik akhir kampanye.

politik (Jeivelien et. al, 2023; Pramono & Prianggodo, 2023; Sulaiman & Rohaniah, 2023).

Kemenangan pasangan nomor urut dua, Wahyu Ferdian dan Ramzi, dalam Pilkada Kabupaten Cianjur 2024, menyoroti peran penting strategi kampanye yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Sebagai pendatang baru, Wahyu Ferdian mampu menarik perhatian masyarakat dengan pendekatan yang lebih segar dan menjanjikan solusi atas permasalahan yang belum terselesaikan oleh petahana¹⁵.

Strategi kampanye yang efektif, penggunaan media sosial, dan pendekatan personal kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan mereka dalam menggalang dukungan luas. Selain faktor strategi, kemenangan Wahyu-Ramzi juga tidak bisa dilepaskan dari fenomena efek ekor jas (*coattail effect*) yang muncul akibat kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Dukungan masif terhadap Prabowo secara nasional ikut mendorong meningkatnya elektabilitas pasangan yang diusung oleh Partai Gerindra di tingkat daerah.

Dengan memanfaatkan program-program nasional Partai Gerindra, seperti ketahanan pangan dan program makan bergizi gratis, Wahyu-Ramzi berhasil menyelaraskan isu nasional dengan aspirasi masyarakat daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa dalam kontestasi politik daerah, selain kemampuan memahami kebutuhan masyarakat, keberhasilan kandidat juga dapat diperkuat oleh gelombang dukungan politik nasional yang mengalir melalui mekanisme ekor jas

¹⁵ Tidak adanya rekam jejak politik justru dijadikan modal untuk membentuk citra sebagai sosok yang bersih dan independen jauh dari pengaruh partai, sejalan dengan rasa jenuh masyarakat terhadap dominasi elit politik lama.

dapat menjadi faktor penentu kemenangan, bahkan bagi kandidat tanpa pengalaman politik sebelumnya (Sugiarto et al., 2014).

Penelitian Egi Ginanjar dan Meidi Kosandi (2023) yang berjudul Strategi Pemenangan Pasangan Herman Suherman – Tubagus Mulyana Dalam Pilkada Kabupaten Cianjur Tahun 2020, menyoroti kemenangan Herman Suherman dan TB Mulyana dalam Pilkada Cianjur 2020 disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Mereka menggunakan strategi campuran yang menggabungkan perluasan basis pemilih baru (ofensif) dan mempertahankan pemilih yang sudah ada (defensif). Selain itu, kekuatan jaringan koalisi partai, kemampuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan adaptasi strategi kampanye selama pandemi COVID-19 juga menjadi faktor penentu.

Penelitian Andi Muhfi Zandi, Juliansyah, Nada Afra (2019) yang berjudul Pemilu Serentak: Dilema Antara Pragmatisme Dan Efektifitas Sistem Presidensial. Penelitian ini menganalisis pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 sebagai upaya untuk memperkuat sistem presidensial, penulis mengidentifikasi bahwa tujuan utama pemilu serentak adalah menciptakan *coattail effect* (efek ekor jas), di mana keterpilihan presiden diharapkan linear dengan perolehan suara partai pendukungnya di legislatif, ataupun di pilkada sehingga menghasilkan pemerintahan yang efektif dan stabil dengan dukungan parlemen yang solid. Namun di sisi lain, jurnal ini menyimpulkan bahwa konsekuensi dari *coattail effect* inilah yang justru menimbulkan dilema pragmatisme. Efek ini, yang diperparah oleh bergabungnya partai oposisi ke dalam koalisi, menyebabkan legitimasi kebijakan eksekutif menjadi terlalu kuat.

Kemudian Penelitian Andries, Lopian, dan Sondakh (2023) menyoroti strategi kemenangan pasangan petahana dalam Pilkada Halmahera Utara 2020. Keberhasilan pasangan Frans Manery dan Muchlis Tapi-Tapi dipengaruhi oleh kampanye yang sistematis, pembentukan citra positif, serta tim sukses yang solid. Penelitian ini menegaskan bahwa kekuatan elektoral petahana sangat bergantung pada rekam jejak dan konsistensi citra selama menjabat. Sementara itu, Hafsari, Al-Barbasy, dan Yunanto (2023) mengkaji kemenangan pasangan non-petahana di Kabupaten Kaur. Mereka menunjukkan bahwa strategi agresif seperti kontra-kampanye dan fokus pada basis massa strategis mampu membawa kemenangan bagi kandidat yang tidak memiliki keuntungan sebagai petahana, asalkan strategi mereka selaras dengan dinamika politik daerah (Hafsari et al., 2024; Jeivelien Edenia Andries, Marlien T, Lopian, 2023).

Kharisma (2022) dalam studinya tentang Pilkada Tangerang Selatan menyoroti pentingnya pemasaran politik berbasis media visual, seperti baliho dan spanduk, yang efektif dalam membentuk popularitas kandidat. Pendekatan ini memperkuat keterhubungan emosional kandidat dengan pemilih. Selanjutnya, Ibrahim (2022) meneliti strategi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam kemenangan pasangan Mohammad Idris dan Imam Budi di Kota Depok. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan tersebut adalah hasil sinergi antara pencitraan tokoh religius, program populis yang konkret, segmentasi pemilih religius, hingga militansi mesin partai yang solid. Terakhir, Lestari et al. (2024) menyoroti kekuatan pendekatan budaya lokal dan kampanye digital dalam kemenangan Dedi Mulyadi

dan Erwan Setiawan di Pilgub Jawa Barat 2024, terutama dalam meraih suara generasi muda (Sri et al., 2025; Yulia Amanda Kharisma, 2022).

Secara keseluruhan, studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa strategi pemenangan dalam pemilihan kepala daerah bersifat kontekstual dan sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti status kandidat sebagai petahana atau non-petahana, kekompakan tim sukses, metode komunikasi politik yang digunakan, serta efektivitas media kampanye dalam menjangkau karakteristik pemilih. Meskipun demikian, terdapat perbedaan yang cukup mendasar antara fokus penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Penelitian ini secara khusus mengkaji pasangan calon non-petahana yang tidak memiliki latar belakang politik, yaitu Dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi Geys Thebe, yang mampu memperoleh dukungan melalui penerapan strategi kampanye yang terstruktur. Kajian mengenai penerapan strategi pemenangan oleh kandidat non-partai seperti ini, terutama yang mengacu pada kerangka teori strategi politik oleh Peter Schroder dan pendekatan teori *coattail effect*, masih belum banyak dilakukan dalam penelitian pemenangan di daerah. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "STRATEGI PEMENANGAN WAHYU-RAMZI DALAM PILKADA KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2024" dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran baru dalam memahami dinamika pemenangan kandidat yang tidak memiliki latar belakang politik.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “ Bagaimana strategi serta pemanfaatan efek ekor jas (*coattail effect*) pasangan Wahyu Ferdian–Ramzi Geys Thebe pada Pilkada Cianjur 2024?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang diterapkan oleh pasangan Dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi Geys Thebe dalam Pilkada Kabupaten Cianjur 2024. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi efek ekor jas (*coattail effect*) yang mendukung keberhasilan pasangan tersebut dalam meraih kemenangan.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu politik, khususnya strategi pemenangan pemilihan kepala daerah, melalui studi atas pasangan calon yang merupakan pendatang baru dalam politik. Selain itu, kajian ini menyoroti strategi komunikasi dan pencitraan kandidat non-partisan, seperti segmentasi pemilih, komunikasi publik. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan elektoral juga dipengaruhi oleh faktor personal dan pendekatan komunikasi yang sesuai dengan konteks sosial, serta dapat menjadi acuan dalam merumuskan strategi pemenangan yang adaptif di tingkat lokal.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi calon kepala daerah dan tim pemenangan dalam merancang serta mengimplementasikan strategi pemenangan yang efektif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada).
2. Melalui kajian terhadap keberhasilan pasangan Dr. Mohammad Wahyu Ferdian dan Ramzi Geys Thebe, penelitian ini dapat memberikan wawasan mengenai pendekatan yang efektif dalam meningkatkan popularitas, membangun hubungan dengan pemilih, serta memanfaatkan potensi calon yang tidak memiliki rekam jejak politik sebelumnya.
3. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi calon kepala daerah yang baru terjun ke dunia politik untuk memahami pentingnya penerapan strategi komunikasi dan pencitraan yang tepat dalam membangun kedekatan dengan pemilih.